

PENGARUH IMPOR PANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PANGAN

The influence Of Food Imports On Farmers Welfare

Martha Carolina* & Robby A. Sirait**

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: * martha.carolina@dpr.go.id, ** roby.sirait@dpr.go.id

Abstract

This study uses Feasible Generalized Least Square (FLGS) model to assess the impact of food import on the farmers welfare by monthly time series data for the period 2011 to 2017. The number of food imports were used as dependent variables and independent variables is Nilai Tukar Petani (NTP) as indicator of farmers welfare degree. The estimation showed a negative relationship between the number of food import and farmers welfare. But, the relationship not statistically significant.

Keywords: Food Imports, Farmers Welfare, Feasible Generalized Least Square

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan pertanian kesejahteraan petani selalu menjadi tujuan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat misi Kementerian Pertanian (Kementan, 2015)

Masyarakat miskin di perdesaan sebagian besar adalah petani. Data BPS (2015) menunjukkan jumlah penduduk miskin di perdesaan yaitu berjumlah 17, 27 juta jiwa atau 13,96 persen terhadap total penduduk perdesaan. Secara khusus kesejahteraan petani perlu mendapatkan perhatian, karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Salah satu arah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah pembangunan tanaman pangan. Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan

produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan pendapatan. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut (Kementan, 2018).

Pembangunan komoditas tanaman pangan disebabkan oleh posisi strategis komoditas pangan terhadap keberlanjutan pembangunan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Komoditas tanaman pangan tersebut adalah padi, kedelai, dan jagung. Padi merupakan salah satu komoditas produk tanaman pangan yang strategis ditinjau dari sisi ekonomi, sosial dan politis. Sekitar 80 persen penduduk Indonesia merupakan konsumen beras yang berasal dari olahan tanaman pangan padi. Indonesia menduduki ranking ke-5 di dunia untuk konsumsi kalori beras per kapita. Proporsi konsumsi beras adalah sebesar 5 persen dari total konsumsi rumah tangga miskin. Implikasinya jika harga beras naik 10 persen maka tingkat kemiskinan naik 1,3 persen. Selain sebagai komoditas ekonomi dan sosial, beras juga merupakan komoditas politik. Beras merupakan kunci ekonomi pedesaan sehingga petani meminta perlindungan agar harga beras tetap tinggi. Di sisi lain, harga tinggi akan merugikan konsumen, petani miskin, dan pedagang (Kementan, 2015). Tidak hanya beras, kedelai juga merupakan produk tanaman pangan lain yang bernilai strategis. Kedelai merupakan komoditas strategis karena kedelai memenuhi kebutuhan protein nabati yang murah untuk sebagian masyarakat Indonesia.

Salah satu target utama dari pembangunan tanaman pangan tersebut adalah terwujudnya swasembada atas beberapa produk tanaman pangan. Namun, hingga saat ini masih sulit diwujudkan, karena: i) terjadinya beberapa isu terkait perubahan iklim dan konversi lahan pertanian menyebabkan target swasembada tersebut tidak dapat tercapai; ii) laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan permintaan terhadap produk tanaman pangan tetap tinggi. Tidak tercapainya swasembada dan tingginya permintaan tanaman pangan akan berimplikasi pada pemenuhan konsumsi pangan nasional. Guna mencegah terjadinya kelangkaan tanaman pangan yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga, maka pemerintah berupaya untuk menutup celah pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor produk tanaman pangan.

1.2. Rumusan Masalah

Di satu sisi, impor pangan yang berjalan saat ini memberikan dampak positif pada pemenuhan konsumsi pangan nasional. Di sisi lain, kebijakan impor ini dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan petani pangan yang merupakan salah satu indikator kedaulatan pangan yang diharapkan oleh Pemerintah. Penelitian Rahim (2010) menemukan bahwa impor beras (salah satu komoditas pangan terbesar) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berbeda dengan temuan Rahim, Menteri Perdagangan menyatakan bahwa impor beras tidak akan merugikan petani (Tribunnews, 2018).

Meskipun penelitian Rahim menemukan hubungan negatif antara impor beras dengan tingkat kesejahteraan petani, penelitian tersebut masih mengandung kelemahan-kelemahan. Penggunaan NTP sebagai variabel terikat dalam penelitian tersebut tidak tepat, jika dihubungkan dengan impor beras. NTP yang digunakan merupakan nilai NTP agregasi dari 5 (Lima) subsektor pertanian, yakni sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan, dan perikanan. Sedangkan variabel terikat yang diuji hubungannya dengan NTP adalah beras yang merupakan salah satu komoditas dari sub sektor pangan. Dengan demikian, estimasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menjadi bias dan tidak valid. Hal ini dikarenakan variabel bebas dan terikatnya bukanlah data yang tepat dan kuat untuk menghasilkan sebuah hasil estimasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut. Agar hubungan yang diuji menjadi valid dan kuat, seharusnya jenis data yang digunakan dalam variabel bebas dan terikat merupakan data yang karakteristiknya sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah impor pangan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani pangan yang di proksi dengan Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). Secara khusus, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh impor pangan terhadap kesejahteraan petani pangan yang diukur dengan Nilai Tukar Petani Pangan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulisan ini adalah menganalisis pengaruh impor pangan terhadap kesejahteraan petani pangan yang diukur dengan Nilai Tukar Petani Pangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Sejalan dengan itu, dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional peningkatan kesejahteraan petani telah dan akan menjadi prioritas pembangunan nasional dan sektor pertanian.

Rachmat (2000) menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani. Secara konsepsi, arah dari NTP (meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani.

Simatupang dan Maulana (2008) mengemukakan bahwa penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani praktis tidak ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani.

NTP adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Sedangkan Indeks harga yang diterima petani (It) menunjukkan perkembangan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan petani (dibanding tahun dasar). Indeks harga yang dibayar petani (Ib) menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi (dibanding tahun dasar).

Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat di kompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu: $NTP > 100$, berarti tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani

sebelumnya; $NTP = 100$, Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan; dan $NTP < 100$, Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

2.2. Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan

Impor tanaman pangan dapat menstabilkan harga beras dalam waktu relatif singkat dan memenuhi kebutuhan domestik. Akan tetapi, impor tanaman pangan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani pangan di sisi yang lain. Bertambahnya jumlah impor pangan ke pasar domestik akan berdampak pada bertambahnya pasokan pangan di pasar domestik. Penambahan pasokan pangan tersebut akan berimplikasi pada penurunan harga, jika penambahan tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya permintaan akan pangan dengan jumlah yang sama. Penurunan harga akibat kelebihan pasokan tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan yang diterima petani dan juga dapat menjadi disinsentif bagi petani untuk tetap memproduksi tanaman pangan atau bahkan untuk meningkatkan skala produksinya. Penurunan pendapatan ini pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani pangan.

Impor beras sebagai salah satu komoditas sektor pangan terbesar, baik dilihat dari nisbah jumlah produksi terhadap total produksi tanaman pangan dalam negeri maupun nisbah jumlah impor terhadap total impor tanaman pangan. Di satu sisi, impor beras yang hingga saat ini masih terjadi hingga saat ini akan berdampak pada terjaganya stabilitas harga di pasar domestik. Di sisi lain, impor beras akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Erwidodo (1997) mengemukakan bahwa impor beras atau masuknya beras dari wilayah lain akan mempengaruhi tingkat penawaran dan harga beras yang pada gilirannya berpengaruh terhadap nilai tukar petani. Demikian juga dengan impor komoditas pangan lainnya. Untuk melindungi kesejahteraan petani dan stabilitas pangan domestik, sejumlah negara mengatur perdagangan beras. Baik melalui kebijakan tarif impor, lisensi impor maupun penerapan kuota impor (Suryana dan Kariyasa, 2008). Pilihan kebijakan oleh sejumlah negara tersebut dilatarbelakangi oleh pengaruh impor terhadap penurunan kesejahteraan petani. Untuk itu, sejumlah negara mengeluarkan kebijakan yang bersifat *barriers* bagi masuknya beras impor seperti penerapan tarif Bea masuk, lisensi impor dan penerapan kuota impor dalam rangka melindungi petani domestiknya.

2.3. Studi Empiris Tentang Pengaruh Harga Komoditas, Inflasi dan Upah Buruh Tani Terhadap Kesejahteraan Petani.

Secara teori, kesejahteraan petani pangan akan membaik apabila selisih antara hasil penjualan produksinya dan biaya produksinya bertambah besar atau juga apabila hasil penjualan produksinya lebih besar dibanding dengan biaya produksi dan biaya konsumsinya. Dengan kata lain, pendapatan petani pangan lebih besar dari pengeluarannya. Besar kecil dan bertambah besar pendapatan dan pengeluaran petani pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Harga komoditas pangan (baik harga domestik maupun internasional), inflasi, dan upah buruh merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani baik mempengaruhi besarnya pendapatan maupun pengeluaran.

2.3.1. Pengaruh Harga Komoditas Pangan Domestik Terhadap Kesejahteraan Petani

Solahuddin (1998) mengemukakan bahwa kebijakan harga komoditas pangan domestik yaitu beras yang diambil oleh pemerintah terlalu bias kepada kepentingan konsumen, melalui kebijakan harga komoditas murah, pengendalian stok, dan operasi pasar. Kebijakan ini tidak saja merugikan kesejahteraan petani, tetapi secara langsung mengancam produksi beras nasional karena dorongan untuk produksi semakin berkurang.

Penelitian Rahim (2010) menunjukkan bahwa kebijakan harga berpengaruh secara nyata terhadap nilai tukar petani dimana pengaruh kebijakan harga komoditas pangan domestik terhadap nilai tukar petani positif akan berdampak pada semakin membaiknya nilai tukar petani pangan atau kesejahteraan petani pangan.

Penelitian Elizabeth (2010) menyatakan bahwa kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka daya beli petani akan meningkat (mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani) yang diformulasikan dalam bentuk nilai tukar petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Winandi (2009) yang mengemukakan bahwa peningkatan harga produk yang dijual petani (jagung dan padi), akan meningkatkan konsumsi pangan dan pendapatan rumah tangga petani (RTP). Peningkatan harga akan efektif apabila kekuatan tawar-menawar di tingkat RTP meningkat, hal ini akan terjadi apabila pembelian ataupun penjualan dilakukan secara kelompok atau koperasi. Kebijakan harga pupuk (terutama subsidi Urea) perlu dilakukan karena akhirnya

akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha tani atau pendapatan total keluarga.

Sedikit intervensi pemerintah terhadap harga patokan (jual dan beli) komoditas pangan domestik khususnya komoditas jagung akan meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen karena intervensi pemerintah akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga tani (Mantau, 2010). Hal ini dengan catatan, penentuan kebijakan harga jual dan beli jagung tersebut dibarengi dengan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggarnya, terutama para pedagang yang membeli jagung petani. Di samping itu, petani perlu bergabung dalam kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam pemasaran produk pertanian.

Penjelasan teoritis tersebut kontradiktif dengan hasil penelitian Daryanto (2008) yang mengemukakan bahwa terkait dengan daya beli, bagi kelompok miskin ada dua pilihan kebijakan dalam menghadapi situasi harga komoditas pangan domestik yang meroket, yaitu mengontrol harga dengan menetapkan harga maksimal (*ceiling price*) atau meningkatkan daya beli. Namun, penetapan harga maksimal bukanlah pilihan yang tepat karena membutuhkan biaya administrasi dan pengawasan yang tinggi, sementara kemampuan pemerintah dalam hal tersebut sangat terbatas selain amat berisiko (berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk subsidi harga). Pilihan kebijakan terbaik adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi pangan kepada penduduk miskin, yang sebagian besar adalah petani.

Hasil penelitian Irawan (2007) menunjukkan bahwa transmisi harga komoditas pangan padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah dari konsumen ke produsen berkisar antara 65,60 persen - 81,30 persen. Transmisi harga tertinggi terjadi pada pemasaran padi, di mana 81 persen kenaikan harga yang terjadi di daerah konsumen diteruskan ke petani di daerah produsen. Tingginya transmisi harga beras tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu: 1) adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras melalui kebijakan harga dasar gabah sehingga kekuatan monopsoni/oligopsoni yang dimiliki para pedagang gabah/beras dapat ditekan, dan 2) karena merupakan bahan pangan pokok, daerah produsen beras relatif tersebar menurut wilayah sehingga jarak antara daerah produsen dan konsumen relatif dekat. Faktor jarak ini pula yang menyebabkan transmisi harga palawija umumnya lebih tinggi dibanding sayuran karena daerah produsen palawija lebih tersebar menurut wilayah dibanding daerah produsen sayuran.

Peningkatan harga produk yang dijual petani (jagung dan padi), akan meningkatkan konsumsi pangan dan pendapatan rumah tangga petani (RTP). Peningkatan harga akan efektif apabila kekuatan tawar-menawar di tingkat RTP meningkat, hal ini akan terjadi apabila pembelian ataupun penjualan dilakukan secara kelompok atau koperasi. Kebijakan harga pupuk (terutama subsidi Urea) perlu dilakukan karena akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha tani atau pendapatan total keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut, kebijakan harga komoditas pangan domestik secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan petani karena kebijakan harga komoditas pangan bertujuan melindungi konsumen atau produsen.

2.3.2. Pengaruh Harga Komoditas Pangan Internasional Terhadap Kesejahteraan Petani

Winandi (2009) mengemukakan bahwa peningkatan harga komoditas pangan internasional dan harga jual di tingkat RTP mempunyai dampak searah yaitu peningkatan konsumsi, upah petani, dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan internasional maupun RTP, membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani.

Penjelasan teoritis tersebut kontradiktif dengan hasil penelitian Darwanto (2000) yang melakukan analisis harga dengan menggunakan data bulanan periode 1997-1999 yang menunjukkan terjadinya transmisi harga komoditas pangan internasional ke harga tingkat pengecer domestik mengakibatkan semakin lemahnya posisi tawar petani sebagai produsen. Dengan demikian dapat diperkirakan akan terjadi pengaruh langsung dari harga pasar internasional ke pasar beras domestik, sementara itu pemerintah melalui Perum Bulog semakin terbatas kemampuannya untuk mempengaruhi harga domestik melalui pembelian dari petani domestik. Konsekuensinya, perlindungan pemerintah terhadap fluktuasi harga domestik semakin lemah sehingga dapat mengakibatkan semakin lemahnya posisi tawar petani sebagai produsen yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan petani.

2.3.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Kesejahteraan Petani

Hasil penelitian yang dilakukan Helmi (2016) menunjukkan bahwa inflasi berhubungan negatif dengan nilai tukar petani. Jika dicermati pengaruh inflasi pada harga yang dibayar petani untuk konsumsi, sarana produksi, dan barang

modal lebih besar dari pada harga yang diterima petani dari hasil produksinya, sehingga secara kumulatif pengaruh inflasi menjadi negatif terhadap kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan setiap peningkatan inflasi sebesar 1% akan menurunkan nilai tukar petani sebesar 0,21. Inflasi perubahan harga-harga yang terjadi di perkotaan memberikan pengaruh juga terhadap kejadian inflasi barang-barang produksi di tingkat pedesaan (IT). Tetapi karena pengaruhnya terhadap harga yang dibayar petani (IB) lebih tinggi maka, pengaruh inflasi menjadi negatif. Indeks harga yang dibayarkan petani untuk kebutuhan konsumsi, barang modal, dan sarana produksi mencerminkan tingkat perubahan harga-harga di tingkat pedesaan. Maka jika inflasi yang terjadi sangat tinggi, daya beli petani akan sangat tertekan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurpita (2017) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki proporsi terbesar dan berdampak jangka panjang dalam mempengaruhi NTP. Pada jangka panjang NTP dipengaruhi oleh inflasi secara negatif. Hal ini sesuai dengan definisi inflasi yang terbentuk dari adanya perubahan harga, dan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani.

Penjelasan teoritis tersebut kontradiktif dengan hasil Penelitian Reza Agung (2018) yang mengemukakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani di provinsi-provinsi di Sumatera periode 2010-2015. Hal ini disebabkan laju inflasi yang relatif stabil dan kenaikan inflasi masih tahap inflasi yang ringan. Stabilitasnya inflasi tidak meningkatkan harga kebutuhan yang harus dibeli petani dan juga inflasi tidak meningkatkan penerimaan petani akibat peningkatan harga produksi.

2.3.4. Pengaruh Upah Buruh Tani Terhadap Kesejahteraan Petani.

Penelitian Riyadh (2015) yang menemukan bahwa biaya tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tukar petani di Sumatera Utara. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajri (2016) bahwa berapapun biaya tenaga kerja yang dibayarkan kepada petani padi di Kabupaten Sragen maka tidak berpengaruh nyata secara individu terhadap nilai tukar petani padi di Kabupaten Sragen. Tidak berpengaruhnya variabel biaya tenaga kerja dalam penelitian ini bukan berarti tidak berpengaruh sama sekali, melainkan pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh biaya tenaga kerja dengan perbedaan yang sangat kecil antara sampel yang satu dengan sampel lainnya sehingga biaya tenaga kerja tidak memperlihatkan pengaruh signifikan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh impor pangan terhadap kesejahteraan petani pangan, penelitian ini menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2010). Penelitian tersebut, meneliti dampak kebijakan harga dan impor beras terhadap nilai tukar petani di pantai utara Jawa Barat dengan periode data tahun 1970–2002, dengan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi transformasi log dengan *time lag*.

Perbedaan utama dalam penelitian ini dengan model penelitian Rahim adalah pemilihan wilayah dan periode data yang digunakan. Penelitian Rahim menggunakan Pantai Utara Jawa Barat dengan periode data tahunan dari tahun 1970 hingga 2002. Sedangkan penelitian ini menggunakan data Indonesia dengan periode data bulanan dari tahun 2011 hingga 2017. Selain itu, perbedaan lainnya adalah variabel terikat yang digunakan dan data yang digunakan untuk variabel impor sebagai variabel tidak terikat yang hendak diuji. Pada penelitian Rahim, variabel terikatnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan variabel impornya menggunakan jumlah impor beras. Sedangkan, penelitian ini menggunakan Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) sebagai variabel terikat, dan variabel impor menggunakan jumlah impor komoditas sub sektor pangan. Perbedaan variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dengan penelitian Rahim didasarkan pada data dan variabel yang digunakan untuk menemukan hubungan antara impor beras dengan tingkat kesejahteraan petani masih mengandung kelemahan-kelemahan. Penggunaan NTP sebagai variabel terikat dalam penelitian Rahim tersebut tidak tepat, jika dihubungkan dengan impor beras. NTP yang digunakan merupakan nilai NTP agregasi dari 5 (Lima) subsektor pertanian, yakni sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan dan perikanan. Sedangkan variabel terikat yang diuji hubungannya dengan NTP adalah beras yang merupakan salah satu komoditas dari sub sektor pangan. Dengan demikian, estimasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menjadi bias dan tidak valid. Hal ini dikarenakan variabel bebas dan terikatnya bukanlah data yang tepat dan kuat untuk menghasilkan sebuah hasil estimasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel. Agar hubungan yang diuji menjadi valid dan kuat, seharusnya jenis data yang digunakan dalam variabel bebas dan terikat merupakan data yang karakteristiknya sama.

Perbedaan lainnya adalah perbedaan penggunaan variabel kontrol lainnya yang mempengaruhi variabel terikat. Penelitian Rahim tidak menggunakan variabel kontrol lain dalam model penelitiannya. Tidak adanya variabel kontrol lainnya dalam penelitian Rahim tersebut akan memiliki implikasi pada model yang tidak cukup kuat untuk menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara parsial maupun secara bersama-sama dengan variabel kontrol lainnya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan variabel harga Gabah Kering Panen (GKP), Inflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar (INFP), Inflasi Kesehatan (INFK), Upah Nominal Harian Buruh Tani (UPAH) dan *Food Price Index* Internasional (FAO) yang dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), sebagai variabel kontrol lain yang mempengaruhi variabel terikat (NTPP). Dengan demikian, spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$NTPPt = \alpha + \beta_1IMPt + \beta_2GKPt + \beta_3INFPt + \beta_4INFKt + \beta_5UPAHt + \beta_3FAOt + \varepsilon \quad ..(1)$$

Berdasarkan persamaan 1, Angka Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) dipengaruhi oleh Jumlah Impor Pangan (IMP), harga Gabah Kering Panen(GKP), Inflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar (INFP), Inflasi Kesehatan (INFK), Upah Nominal Harian Buruh Tani (UPAH) dan *Food Price Index* Internasional (FAO).

3.2. Jenis dan Sumber Data

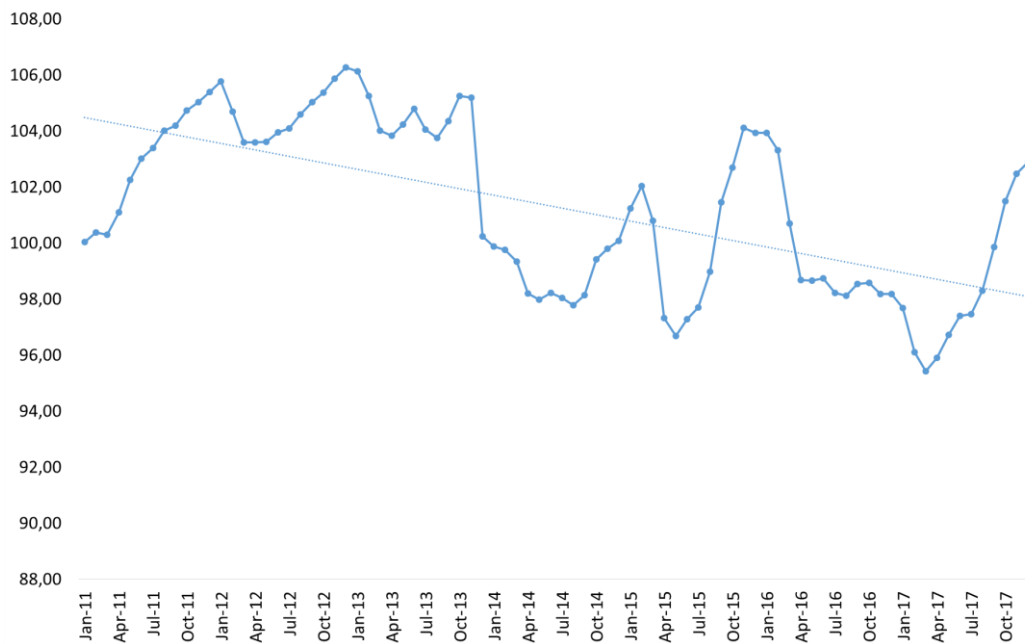
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series bulanan periode tahun 2011 – 2017. Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian RI, *United Nations Comtrade Database* dan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Feasible Generalized Least Square (FLGS)*. Penggunaan metode estimasi FLGS tersebut dikarenakan pada saat menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) ditemukan masalah auto korelasi dalam model.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif Tentang Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP)

Nilai tukar petani pangan (NTPP) pada kurun waktu 2011 – 2017 mengalami fluktuasi. Dibandingkan periode tahun 2011–2013, NTPP pada periode 2014–2017 mengalami tren penurunan dan lebih rendah. Pada periode 2011 – 2013, NTPP masih berada di atas 100, yang berarti pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. Per Januari 2014 hingga Agustus 2015, NTPP berada dibawah 100. Dari September 2015 hingga Maret 2016 meningkat diatas 100 dan kembali berada dibawah 100 dari April 2016 hingga September 2017. Kemudian meningkat diatas 100 pada periode Oktober–Desember 2017.

Gambar 1. Perkembangan NTPP Tahun 2011 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2018).

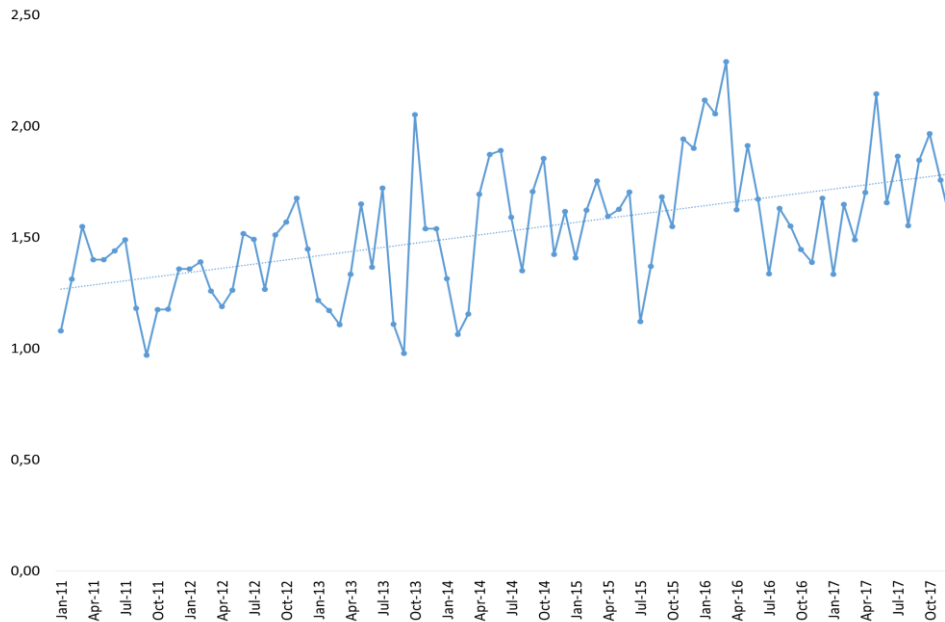
Jika melihat sebaran data menurut bulan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pangan pada periode 2014–2017 lebih rendah dibanding 2011 – 2013 dan secara rata-rata petani pangan mengalami defisit (NTPP < 100).

4.2. Analisis Deskriptif Tentang Impor Pangan

Dalam kurun 2011–2017, impor pangan bulanan mengalami fluktuasi. Jika dilihat trennya, dalam kurun waktu tersebut impor pangan mengalami tren yang meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga terlihat pada data kumulatif impor tahunan. Pada tahun 2011 impor pangan sebesar 15,53 juta ton, meningkat menjadi 16,93 juta ton pada 2012. Meskipun sempat menurun pada tahun 2013

(16,78 juta ton), impor pangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 18,53 juta ton dan tahun 2015 menjadi 21,38 juta ton. Mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 20,69 juta ton dan 20,52 juta ton.

Gambar 2. Perkembangan Impor Pangan Tahun 2011 – 2017



Sumber: Kementerian Pertanian RI, Diolah (2018).

4.3. Hasil Estimasi

Hasil uji empiris dengan menggunakan *Feasible Generalized Least Square (FLGS)* dan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics 20* disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi OLS dan FLGS

Variabel	Model OLS	Model FGLS
C	62,767	59,570
IMP	-0,024	-0,831
GKP	0,626*	0,735*
INFP	-0,210**	-0,292*
INFK	-0,152	-0,190**
UPAH	-0,041	-0,071
FAO	1,026*	1,136*
R ² :	0,375	0,453
F (Prob)	0,000	0,000

Keterangan : *Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%

Pada tabel 1 dapat diperhatikan bahwa nilai F-Statistic (probabilita model 0,00) menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Ini berarti bahwa keenam variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) sebesar 45,3 persen dan 54,7 persen ditentukan oleh faktor lain.

Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa impor sub sektor pangan (IMP) berpengaruh negatif terhadap nilai tukar petani pangan (NTPP). Hubungan negatif antara impor pangan dengan nilai tukar petani pangan dalam studi ini sejalan dengan hasil penelitian Rahim (2010). Artinya, semakin besar jumlah impor sub sektor pangan yang masuk ke pasar domestik, maka akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani sektor pangan di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh impor sub sektor pangan tersebut tidak signifikan secara statistik. Tidak signifikannya hubungan kedua variabel ini dapat dijadikan indikasi awal bahwa jumlah impor sub sektor pangan pada periode waktu penelitian tidak begitu menggerus nilai tukar petani pangan. Artinya, impor pangan secara kuantitas tidak mengurangi secara signifikan pasokan pangan dari petani kepada konsumen atau pasokan pangan dari petani ke pasar domestik. Demikian juga dengan penurunan harga pangan domestik paska adanya impor pangan.

Secara parsial, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel GKP dan FAO berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, peningkatan harga Gabah Kering Panen dan Harga Pangan Internasional akan berdampak pada semakin membaiknya nilai tukar petani pangan atau kesejahteraan petani pangan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Rahim (2010), Fajri et.al (2016) dan Nirmala et.al (2016) yang menemukan bahwa harga komoditas pangan dan harga gabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar petani.

Untuk variabel UPAH, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel UPAH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, peningkatan upah nominal buruh tani akan berdampak pada penurunan nilai tukar petani pangan, begitu sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riyadh (2015) yang menemukan bahwa biaya tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tukar petani di Sumatera Utara.

Sedangkan untuk variabel INFP dan INFK, secara parsial hasil estimasi juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, peningkatan harga atau pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kesehatan akan berdampak pada penurunan nilai tukar petani pangan atau kesejahteraan petani pangan secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Helmi (2006) dan

Amalia dan Nurpita (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memperoleh beberapa temuan. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa impor pangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap nilai tukar petani pangan (NTPP). Temuan ini menunjukkan bahwa impor pangan tidak berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani pangan. Tidak signifikannya pengaruh impor pangan terhadap NTPP tersebut menunjukkan bahwa jumlah impor tidak begitu signifikan menggerus nilai tukar petani. Dengan kata lain, jumlah impor pangan tidak begitu signifikan mengurangi pasokan pangan dari petani ke pasar domestik. Demikian juga dengan penurunan harga pangan domestik pasca adanya impor pangan. Artinya, adanya impor pangan tidak serta merta secara signifikan menurunkan harga pangan domestik yang dapat berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani pangan. Hal ini terjadi dapat diakibatkan oleh adanya impor memang menutupi kebutuhan atau permintaan domestik yang memang tidak dapat di pasok oleh petani pangan di domestik.

Kedua, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel GKP dan FAO berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, peningkatan harga Gabah Kering Panen, dan Harga Pangan Internasional akan berdampak pada semakin membaiknya nilai tukar petani pangan atau kesejahteraan petani pangan.

Ketiga, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel UPAH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, peningkatan upah nominal buruh tani akan berdampak pada penurunan nilai tukar petani pangan, begitu sebaliknya.

Keempat, secara parsial hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel INFP dan INFK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NTPP. Artinya, kenaikan harga atau pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kesehatan akan berdampak pada penurunan nilai tukar petani pangan atau kesejahteraan petani pangan secara signifikan.

5.2. Rekomendasi

Penelitian menemukan bahwa jumlah impor pangan berpengaruh negatif terhadap nilai tukar petani pangan (NTPP), meskipun tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, pengaruh yang negatif tersebut sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk tetap melakukan proteksi terhadap derasnya impor sub sektor pangan. Selain proteksi, upaya mendorong produktivitas dan daya saing komoditas pangan domestik juga perlu dilakukan oleh Pemerintah agar berdampak pada pengurangan impor pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh melalui intervensi maupun penguatan dukungan anggaran pemerintah terhadap faktor-faktor input yang mempengaruhi produktivitas sub sektor pangan, seperti pupuk, irigasi, bibit atau benih, permodalan bagi petani serta kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah kering dan panen bagi komoditas padi.

Saat ini, dukungan baik regulasi maupun anggaran faktor-faktor input tersebut memang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi, berbagai dukungan tersebut masih dihadapkan oleh persoalan ketidakefektifan dan ketidaktepat sasaran. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong kesejahteraan petani dan mengurangi impor pangan ke pasar domestik, penguatan dukungan tersebut sangat diperlukan, baik dari sisi kuantitas maupun efektivitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Action Aid International. (2008). *Impact of Agro-Import Surges in Developing Countries*. Johannesburg: Action Aid International
- Amalia, Nurisqi dan Nurpita, Anisa. (2017). Analisis Dinamika Kesejahteraan Petani Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 2, December 2017, Hal. 222-227.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jumlah penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016*. Indonesia.
- Daryanto, A. 2008. Selamat tinggal era pangan murah. *Trubus* Maret 2008
- Darwanto, Dwijono H. 2005, Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmu Pertanian* 12(2):152 – 164, Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.

- Elizabeth, Roosgandha dan Darwis, Valeriana. 2000. Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kedelai (Studi Kasus: Provinsi Jawa Timur). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor Badan Litbang Departemen Pertanian.
- Erwidodo. 1997. Stochastic Production Frontier and Panel Data Measuring Economic Efficiency on Rice Farm in West Java. *Jurnal Agro Ekonomi*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Balitbang. Deptan.
- Fajri, Mohammad Romdhoni., Marwanti, Sri., & Rahayu, Wiwit. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani Padi Di Kabupaten Sragen. *Agrista*, Vol. 4 No.2 Juni 2016, Hal. 85 – 94.
- Febriyanti, Friska Tri. (2012). Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta (Skripsi Universitas Indonesia).
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Agricultural import surges in developing countries: Analytical framework and insights from case studies*. Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Gujarati. D (1995). *Basic Econometrics (3rd Ed.)*. New York: Mc. Graw Hill
- Nachrowi, & Usman, Hardius. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Helmi, Akhmad. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (Tesis). Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Irawan, B. 2007. Fluktuasi harga, transmisi harga dan margin pemasaran sayuran dan buah. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 5(4): 358–373
- Hessie, Rethna (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri Serta Implikasinya Terhadap Swasembada Beras di Indonesia (Skripsi Insitut Pertanian Bogor).
- Kementan (2015). Laporan Akhir: Kajian Efektivitas Kebijakan Impor Produk Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Harga. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

- Kementan (2018). Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.
- Mantau, Z., Bahtiar, dan Aryanto. 2010. Kajian Kebijakan Harga Pangan Non Beras Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional. Sulawesi Utara: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Nirmala, Arlia Renaswari., Hanani, Nuhfil, & Muhaimin, Abdul Wahib. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Habitat*, Volume 27, No. 2, Agustus 2016, Hal. 66-71.
- Nurpita. 2017. Analisa Dinamika Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Article History* Vol. 5, No. 2, December 2017.
- Purba, T.Y., Tarigan, K. and Salmiah, S., 2017 Dampak Nilai Tukar Petani Terhadap Kesejahteraan Petani Cabai Merah (*Capsicum annum L.*)(Kasus: Desa Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 8(6)
- Rahim, Manat. (2010). Dampak Kebijakan Harga dan Impor Beras terhadap Nilai Tukar Petani di Pantai Utara Jawa Barat. *Trikonomika* Volume 9, No. 1, Juni 2010, Hal. 29–36.
- Rachmat, Muchjidin. 2000. Analisa Nilai Tukar Petani Indonesia. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Reza Agung. 2018. Determinan Nilai Tukar Petani Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2010-2015. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Riyadh, Muhammad Ilham. (2015). Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, Hal. 17-32.
- Simatupang dan Maulana. 2008. Kaji Ulang Konsep dan Pengembangan Nilai Tukar Petani 2003-2006. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. LIPI.
- Suryana, Achmad dan Ketut Kariyasa. (2008). Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 26 No. 1, 17-13.
- Suseno, D & Suyatna, H 2007, 'Mewujudkan kebijakan pertanian yang pro-petani', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 10, no. 3, pp. 267–294.

- Solahuddin, Soleh. 1999. Visi Pembangunan Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Tambuan. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia (beberapa isu penting). Ghalla. Jakarta
- Wibowo, Tri. (2011). Dampak Kenaikan Harga Pangan Dunia Terhadap Inflasi dan Ketahanan Pangan Indonesia. Jurnal Keuangan dan Moneter, Vol. 14, No. 2, 17- 62.
- Widiarsih, Dwi.2012.Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun II No.6, Juli 2012.
- Winandi, Ratna. 2009. Gejolak Harga Komoditas Pangan Internasional Dampak dan Implikasi Kebijakan Bagi Ketahanan Pangan Indonesia. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Internet

- Ahmad Imam. 2018. Tribunnews. Diakses kembali <http://jabar.tribunnews.com/2018/02/27/saat-sambang-cirebon-menteri-perdagangan-pastikan-impor-beras-tidak-rugikan-petani> tanggal 30 Agustus 2018